



**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENANGANI KESENJANGAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA MAPUR,  
KECAMATAN BINTAN PESISIR, KABUPATEN BINTAN**

*The Role Of The Education Department In Addressing Education Gaps In  
Coastal Communities In Mapur Village, Bintan Pesisir District, Bintan  
District*

Erika Rahayu Sihaloho<sup>1\*</sup>, Novi Winarti<sup>2</sup>, Ardi Putra<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Email : [erikasihaloho08@gmail.com](mailto:erikasihaloho08@gmail.com)

<sup>2</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Email : [Noviwinarti@umrah.ac.id](mailto:Noviwinarti@umrah.ac.id)

<sup>3</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji,

\*email koresponden : [erikasihaloho08@gmail.com](mailto:erikasihaloho08@gmail.com)

DOI:

Article info:

Submitted: 28/01/24

Accepted: 30/01/24

Published:30/01/24

**Abstract**

The state of education in Mapur Village is that education in Mapur Village, especially elementary and junior high school levels in Mapur, is still minimal, and does not have good facilities. Apart from the facilities being the reason, awareness of parents and their children is very minimal regarding the importance of education, so the role of the Education Department is needed to pay more attention to education in the village. Essentially, the aim of education is to form humans who are not only able to adapt themselves and live in society but, more importantly, who are able to contribute to change in society and act as balancers for society. This research uses Biddle and Thomas' theory of money using four indicators, namely expectations, norms, forms of behavior, evaluation and sanctions. The type of research used is qualitative descriptive research. Data collected using interview and documentation methods. The aim of this research is to determine the role of the Education Department in dealing with educational disparities in Mapur village, Bintan Coast sub-district, Bintan Regency. The results of this research show that the hope of the parents and teaching staff is that there will be additional English teachers and transportation equipment which is expected to be operational every day. In carrying out its role, the Education Department prioritizes norms and adheres to Law 23 of 2014. The concrete manifestations that are clearly visible are the distribution of free uniforms, distribution of free stationery and the existence of smart Indonesian cards for underprivileged students. Evaluations and sanctions from student parents stated that the department deserved a positive assessment and educational staff also said that the department deserved a positive assessment, but there were several things that needed to be evaluated.

**Keywords :** Role, education, government



### Abstrak

Keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikan diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas yang menggunakan empat indikator, yakni harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas Pendidikan yang berperan dalam menangani kesenjangan Pendidikan di desa mapur, kecamatan bintang pesisir kabupaten bintang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harapan dari para wali murid dan para tenaga pendidik yaitu adanya penambahan guru bahasa Inggris dan alat transportasi yang diharapkan bisa beroperasi jalan setiap hari. Dalam melaksanakan peran Dinas Pendidikan mengutamakan norma dan berpegang teguh kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014. Wujud nyata yang terlihat jelas yaitu adanya pembagian baju seragam gratis, apembagian alat tulis gratis serta adanya kartu Indonesia pintar bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Evaluasi dan sanksi para wali murid mengenyatakan bahwa dinas pantas mendapatkan penilaian yang positif dan juga para tenaga Pendidikan berkata demikian bahwa dinas layak mendapatkan penilaian yang positif hanya saja ada beberapa hal yang harus di evaluasi.

**Kata kunci :** peran, Pendidikan, pemerintah

## 1. PENDAHULUAN

Desa Mapur merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bintang sebuah kawasan pesisir Pulau Bintang. Secara geografis Desa Mapur terletak di antara garis lintang 006 garis lintang selatan 1034 garis lintang selatan dan garis bujur 1040 garis bujur 1080 garis bujur timur, dengan luas wilayah 484 kilometer persegi. Luas daratan 44 kilometer persegi, dan luas laut +440 kilometer persegi. Secara administratif, Desa Mapur terletak di sebelah utara Kabupaten Bintang yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Klun, sebelah barat dengan Pegunungan Kijang, dan sebelah timur dengan Laut Cina Selatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Bintang diberi tugas “melaksanakan pembangunan ekonomi daerah berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan”. Sehubungan dengan amanat tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintang mengutamakan:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri,
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan,
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan pemasaran hasil perikanan, dan
4. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Ikan Masyarakat Nelayan.



Rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah ciri umum pada masyarakat pesisir di berbagai Wilayah Indonesia. Faktor ekonomi lah yang menyebabkan anak-anak kesulitan untuk bersekolah sehingga mereka harus bekerja untuk bisa bersekolah. banyak anak yang harus bekerja yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah tidak menutup kemungkinan mereka sudah bekerja menjadi nelayan ketika masih usia sekolah, mereka bekerja untuk membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pandangan dan persepsi masyarakat pesisir tentang dunia Pendidikan, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan formal di masyarakat Pesisir tradisional Indonesia yang masih kurang dipahami Pentingnya pendidikan formal untuk masa depan. Begitu juga masyarakat pesisir Berpikir pendidikan formal tidak begitu penting dalam kehidupan, hal Hal ini diperparah dengan banyak dan beragamnya orang tua Ada alasan bagus mengapa mereka enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tertinggi, antara lain karena keterbatasan finansial pendidikan formal yang lebih tinggi. Pendidikan pada dasarnya merupakan perubahan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam perjuangan mendewasakan insan melalui upaya pengajaran dan pembinaan. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikan diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Adapun penyebab yang mengakibatkan melek pendidikan di daerah ini rendah dikarenakan oleh kurangnya pengawasan, motivasi, dan lingkungan sekitar. Dalam hal pengawasan dan motivasi terhadap anak harusnya tugas orang tua karena pertama kali anak mendapat Pendidikan itu dari keluarga dan dari situ orang tua harus bijak membagi waktu untuk mengawasi anak dan memberikan perhatian lebih semasa pendidikannya. Agar anak tidak mudah pengaruh lingkungan sekitar dan memiliki kepribadian dan pendirian kuat atas apa yang diberikan keluarga di rumah. Tetapi hal ini tidak ada sama sekali dilakukan orang tua sehingga mental dan karakter anak tidak tumbuh dengan baik. Sehingga dampaknya anak melampiaskan ke hal buruk seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan menghabiskan waktu di luar rumah dengan kegiatan-kegiatan yang kurang baik bagi masa depan mereka. Namun di lihat dari keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut.

Kondisi bangunan sekolah yang ada di desa mapur terbilang sangat memenuhi standar hanya saja bangun kantin yang masih di luar lingkungan sekolah yang mengkhawatirkan pada siswa untuk cabut saat jam Pelajaran. dan juga sarana dan prasana yang telah di sediakan sudah bagus hanya saja karena akses listrik yang belum masuk ke sekolah tersebut sehingga para siswa hanya belajar secara teori tanpa ada sentuhan dari metode tambahan yang pada dasarnya para guru sangat menginginkan para siswa untuk bisa belajar menggunakan infocus dan berbagai metode yang ada hanya saja kondisi listrik yang tidak memungkinkan ini yang membuat pada tenaga pendidik berharap agar cepat nya masuk aliran listrik yang memadai. Adapun kondisi



alat transportasi untuk guru dan siswa, karena pada dasar tenaga pendidik yang mengajar di desa ini tidak berasal dari desa itu sendiri, sehingga para tenaga pendidik menggunakan alat transportasi yang di sediakan, dan alat transportasi sudah terbilang bagus hanya saja jadwal keberangkatan alat transportasi tersebut tidak berjalan setiap hari, dan juga para tenaga pendidik ketika berpergian menggunakan dana pribadi.

Kultur Pendidikan dari zaman ke zaman baik terjadi yang di desa atau pun di kota mempunyai kesamaan utamanya dalam hal penelitian tentunya. Adapun metode yang dikembangkan dalam dunia pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat menerima pikiran positive seperti objektivitas, empiris, yang tidak memihak pada peserta, yang berjarak dengan objek belajar, rasional dan bebas nilai, sehingga banyak fasilitator yang sesungguhnya justru berperan menjadi penghambat proses pembebasan dan ikut serta pula untuk menumpas benih-benih watak emansipatoris pada setiap proses Pendidikan dan pelatihan (Nur, n.d.).

Dalam melaksanakan pendidikan tentu saja bukan mengutamakan penanaman semata melainkan menumbuhkan karakter bangsa yang di maksud juga telah diatur di dalam undang-undang negara Indonesia. Yang mana hal ini dilakukan gunakan memberikan arah terhadap pelaksanaan dan perkembangan pendidikan di Indonesia untuk masa yang akan datang. Yang mana dengan demikian Pendidikan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap masyarakat dan Negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, telah diatur terkait arah dan cara pelaksanaan pendidikan nasional. Dengan tujuan dan fungsi pendidikan yang telah terurai di dalam undang-undang tersebut arah pendidikan dapat terlihat secara jelas bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang lebih baik. Adapun fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang berkaitan dengan melaksanakan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan standart pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah Pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa (Wayan I Cong Sajuna, 2019).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 1 Tahun 2018 Pasal 13 ayat (1) Dinas melakukan pengelolaan pendidikan di daerah serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis pendidikan di Daerah, pada Pasal 17 Dinas Pendidikan memastikan pengelolaan pendidikan daerah dan menyusun atau menetapkan kebijakan teknis daerah, menjamin pengarahannya, supervisi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengembangan serta melaksanakan kebijakan teknis pendidikan pada tingkat manajemen pendidikan, satuan pengajaran, peta jalan pendidikan, tingkat pengajaran dan jenis pengajaran sesuai dengan kebijakan pendidikan daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor: 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Penyelenggara Pendidikan bertujuan untuk menjamin:



1. Akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan dasar yang mencukupi, merata, dan terjangkau.
2. Mutu dan relevansi dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat.
3. Akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
4. Keharmonisan dan keseimbangan serta interaksi yang optimal dari unsur-unsur esensial Pendidikan.
5. Efektivitas dan efesiansi oprasional Pendidikan.

Penyelenggara Pendidikan berfungsi untuk:

1. Menyediakan secara optimal sumber daya dan proses pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Menetapkan arah kebijakan dan membantu keputusan-keputusan yang sesuai bagi penyediaan pendidikan di daerah.
3. Mengharmoniskan lingkungan pendidikan guna memenuhi kekuatan dan keterpaduan nilai dan norma pendidikan di daerah.
4. Mengembangkan model-model pembelajaran dan transfer nilai keilmuan dan teknologi secara demokratis.

Melihat tujuan utama penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar yang memadai, adil dan terjangkau, Desa Mapur masih melihat masyarakat tidak bersekolah, selain semakin kurangnya dukungan layanan dan infrastruktur pertanyaan sebagai “Peran Lembaga Pembelajaran dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Masyarakat Pesisir di Desa Mapur, Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Bintang”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan Penelitian Deskriptif karena menggunakan teori untuk sebuah penjelasan, sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Oleh sebab itu, penelitian dilaksanakan dengan penjabaran, penggambaran dan ringkasan dalam berbagai situasi guna memperoleh pemahaman mengenai Evaluasi Kesenjangan Pendidikan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Mapur, Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau.

Objek dalam penelitian ini adalah kesenjangan Pendidikan di masyarakat pesisir, kelurahan mapur, kecamatan bintang pesisir. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Mapur, Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan jauh tertinggalnya Pendidikan di masyarakat pesisir. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah melihat dari fenomena minimnya Pendidikan di masyarakat pesisir, dikarenakan kurangnya partisipasi terhadap anak dan peran dinas Pendidikan yang belum optimal. Dalam suatu penelitian langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Pada penelitian metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mapur terletak di kecamatan bintang pesisir kabupaten bintang kepulauan riau yang berasal dari nama Negara Malaysia dan Singapura. Awal sejarahnya ternyata Kerajaan pulau penyengat yang mendirikan nama desa mapur semenjak tahun 1940 hingga sampai saat ini. Pada saat itu Desa Mapur dijadikan tempat persinggahan Masyarakat dari berbagai daerah ada juga Masyarakat yang datang dari singapura dan Malaysia hingga Masyarakat suku laut karena wilayah Desa Mapur begitu dekat dengan Negara Malaysia dan Singapura. Sebelum dinamai Desa Mapur Desa ini sempat akan dinamai Pulau Pasir Panjang pada tahun 1930an. Karena dulu Desa ini dijadikan tempat persinggahan untuk orang suku laut beristirahat beserta keluarganya. Saat ini berbagai suku yang datang hingga berdiam di Desa Mapur ada suku dari Jawa, Buton, Melayu, Flores dan Tionghua.

Kondisi sosial Masyarakat di Desa Mapur terbilang bagus karena Sebagian besar penduduk di Desa Mapur bermata pencarian sebagai nelayan dan para nelayan tersebut menggunakan boat pribadi, sementara itu kondisi ekonomi Masyarakat di Desa Mapur terlihat sangat memenuhi standar karena penduduk di Desa mendiami dan memiliki rumah pribadi dan boat, kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Mapur terus mengalami peningkatan karena dapat dilihat dengan adanya Masyarakat yang bersekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dan alat transportasi yang digunakan oleh Masyarakat mapur yaitu motor dan juga boat. Adapun kondisi Pendidikan, ekonomi, dan sosial :

Tingkat Pendidikan	Angka partisipasi murni menurut jenjang Pendidikan (Persen)		
	2019	2020	2021
SD/MI/Paket A	99,96	99,93	99,46
SMP/MTs/Paket B	88,35	89,10	89,47
SMA/SMK/MA/Paket C	80,02	80,83	81,93

Sumber data; BPS Kabupaten Bintang Tahun, 2019 – 2021.

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa jumlah dilihat bahwa jumlah Masyarakat yang menduduki bangku sekolah masih terbilang diambang abamng hal ini dilihat dari data Masyarakat yang sekolah di tahun 2019-2021 mengalami peningkatan namun juga mengalami penurunan.

### Peran Dinas Pendidikan Dalam menangani Pendidikan Masyarakat pesisir di Desa Mapur



Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah kesenjangan Pendidikan di Masyarakat pesisir Kecamatan Bintang pesisir Kabupaten Bintang. Pendidikan adalah salah satu cara untuk memastikan dan meningkatkan Aspek ekonomi dan sosial dari kualitas hidup manusia. Dan berbagai cara di mana ketimpangan dapat diatasi untuk bekerja menuju kesetaraan dan kehidupan yang berkelimpahan. Jika produktivitas manusia lemah, masyarakat tidak akan makmur. Dalam masyarakat, pendidikan berperan dalam mengubah masyarakat, dan kemajuan pendidikan didasarkan pada membawa perubahan dalam pemikiran manusia dan perilaku rasional. Dari perspektif teori peran pendidikan dalam proses perubahan, dapat dilihat dari perspektif struktur fungsional, yang didasarkan pada peran aktif pendidikan dalam mendukung tatanan sosial. Rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah ciri umum pada masyarakat pesisir di berbagai Wilayah Indonesia. Faktor ekonomi lah yang menyebabkan anak-anak kesulitan untuk bersekolah sehingga mereka harus bekerja untuk bisa bersekolah. banyak anak yang harus bekerja yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah tidak menutup kemungkinan mereka sudah bekerja menjadi nelayan ketika masih usia sekolah, mereka bekerja untuk membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam melihat peran dinas dalam menangani kesenjangan Pendidikan di desa mapur penulis menggunakan teori Biddel Thomas yang mana untuk mencari tau ruang lingkup peran yang di kerjakan oleh seseorang yang mendiami suatu posisi atau suatu jabatan tertentu bisa di lihat dari tindakannya. Dalam menjalankan perannya ada 4 (empat) indicator yaitu sebagai berikut:

**a) Harapan**

Indikator peran berdasarkan harapan yaitu, suatu harapan yang digunakan oleh seseorang terkait suatu perilaku yang sepadan dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh individu yang memiliki peranan tertentu yang mana dalam hal ini dinas Pendidikan kabupaten bintang yang mempunyai tanggung jawab dalam bidang sarana dan prasarana yang mana ada harapan dari Masyarakat terhadap dinas Pendidikan untuk tetap bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Dari peran yang berindikatorkan harapan dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugasnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang sudah menjalankan tugasnya dengan baik hanya saya masih terdapat harapan yang besar dari tenaga pendidik dan para wali murid yaitu para tenaga pendidik berharap agar transportasi bisa beroperasi setiap hari hal ini bukan tanpa alasan tetapi karena keterbatasan di Desa sehingga membuat para tenaga pendidik harus bolak balik ke keluar desa. Para wali murid berharap agar di tambahkan tenaga pendidik yang khusus dan memang lulusan Bahasa Inggris, sementara itu tenaga pendidik berharap agar alat transportasi bisa beroperasi setiap hari di samping itu juga tenaga Pendidik berharap agar aliran listrik bisa lebih fokuskan dan di utamakan karena pada saat ini sudah tersedia laboratorium hanya saja belum bisa di gunakan karena aliran listrik yang masih lemah, tenaga pendidik juga berharap agar siswa siswi di sana bisa belajar menggunakan infocus agar tidak tertinggal dengan siswa siswi yang ada di kota.

**b) Norma**

Norma yaitu salah satu bentuk aturan yang mengatur aturan yang menjadi pondasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kewajiban dalam hal ini bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dalam menjalankan dan melaksanakan peranya berdasarkan tupoksi yang benar-benar sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dari peran yang berdasarkan indicator norma dapat di lihat bahwa semua pihak yang terlibat sudah melakukan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada, dan semua yang dilakukan sudah berjalan dengan norma norma dan peraturan yang ada tetapi tidak menutup kemungkinan semua pihak yang terlibat juga melakukan dan menjalankan tugasnya di sertai rasa empati.

#### c) **Wujud Perilaku**

Wujud perilaku merupakan peran yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bintan dalam memanifestasikan perilaku nyata bukan hanya sekedar menjadi harapan bagi Masyarakat saja. Peran diwujudkan dalam perilaku seseorang dalam menampilkan wujud perilakunya, wujud tersebut dinampakan melalui aktivitas Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Bagaimana kedepannya kedepannya peran melalui kebijakan serta program yang sedang dijalan tersebut dapat membawa wujud nyata atau menjadi sebuah jawaban akan harapan yang di harapkan oleh banyak orang baik berupa pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, bahwasannya wali murid dan tenaga pendidik sudah merasakan wujud perilaku yang nyata namun yang masih menjadi probelamatika hingga saat ini adalah alat transportasi yang tidak beroperasi setiap saat hal ini menyebabkan tenaga pendidkn kesulitan Ketika ingin berpergian karena sesuatu hal, dan juga para wali murid berharap agar di tambahkannya guru bahasa inggris karena para wali murid beranggapan bahwa Pelajaran bahasa inggris adalah Pelajaran yang penting.

#### d) **Evaluasi dan Sanksi**

Evaluasi yang dimaksud yaitu pemberian sebuah pesan dan kesan yang positif maupun pesan dan kesan yang negative yang didasarkan pada harapan banyak orang akan peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bintan . sementara itu sanksi yang dimaksud adalah sebuah usaha agar memegang nilai yang positif. Melihat dari penuturan dari informan tersebut bahwa kinerja kerja dinas sudah baik namun hanya saja ada beberapa hal yang harus di perhatikan, semua aktivitas sudah sesuai dengan harapan orang tua wali murid, hanya saja ada harapan yang besar dari wali murid dan tenaga pendidik, para wali murid berharap agar secepatnya di tambahkan tenaga pengajar khususnya bahasa inggris, sementara itu tenaga pendidik berharap agar alat transportasi bisa beroperasi setiap hari dan juga aliran listrik yang memadai sehingga tenaga pendidik bisa mengajar menggunakan fasilitas yang ada..



#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan bahwa peran Dinas Pendidikan Dalam Menangani Kesenjangan Pendidikan Masyarakat Pesisir Di Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, sudah terbilang baik hal ini dikarenakan penanganan dan pelayanan serta bukti nyata yang sudah dirasakan oleh wali murid dan tenaga pendidik di sekolah terkait. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut:

a) Harapan

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang selalu memberikan inovasi dan membuat kebijakan dengan berbagai macam cara agar tidak ada kata untuk tidak ada anak yang sekolah di zaman ini. Harapan yang ditaruhkan oleh wali murid yaitu agar adanya penambahan tenaga pendidik khususnya guru bahasa Inggris dan tenaga pendidik berharap agar alat transportasi bisa beroperasi setiap hari dan aliran listrik agar bisa diperbaiki agar labor dan infocus bisa digunakan sedemikian.

b) Norma

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang selalu mengutamakan norma dan selalu berpegang pada norma-norma yang ada yang sesuai dengan peraturan yang ada.

c) Wujud Perilaku

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan selalu memberikan wujud perilaku atau bukti nyata. Wujud nyatanya terlihat dari apa yang telah dilakukan oleh dinas Pendidikan, diantaranya dengan memberikan bantuan mulai dari seragam sampai ke alat tulis.

d) Evaluasi dan sanksi

Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan layak mendapatkan penilaian yang positif. Dengan kata lain wali murid berpandangan bahwa hal yang dilakukan oleh dinas Pendidikan ini semuanya positif, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dinas khususnya tenaga Pendidikan dan alat transportasi.

#### Saran :

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Menangani Kesenjangan Pendidikan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan, terdapat beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil peneliti ditemukan masih ada beberapa kekurangan sehingga peneliti berharap dinas Pendidikan selalu mempunyai inovasi yang baru.
2. Sebaiknya dinas Pendidikan membuat kebijakan untuk bisa menambahkan tenaga pendidik khususnya bahasa Inggris, karena Masyarakat berpandangan bahwa bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang penting.
3. Sebaiknya Dinas Pendidikan membuat kebijakan untuk bisa mengoperasikan alat transportasi agar bisa beroperasi setiap hari dan untuk biaya transportasi di gratiskan.
4. Diharapkan di masa yang akan datang agar ada peneliti yang meneliti terkait sekolah SMA yang berada di desa Mapur dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Dari buku teks:

- Amraeini, Y. M., & Nirwan, M. (2021). Sosial Budaya Kesehatan dan Lingkungan Masyarakat Pesisir dan Tambang (Nasrudin, Ed.). PT.Nasya Expanding Managent.
- Berger Charles R, E Michael, R David dan Roloff, Ewoldsen-Roskos, Widowatie Derta Sri, & M.Irfan Zakkie. (2021). Teori Komunikasi Noverbal Tentang Adaptasi Interaksi.
- Elfrianto, & Lesmana, G. (2022). Metodologi Penelitian Pendidikan (B. N. Tanjung, Ed.). Umsu Press.
- Fadhallah. (2021). Wawancara. UNJ Press.
- Hidayat Rahmat, & Abdilah. (2019). Ilmu Pendidikan (Konsep, Teori, dan Aplikasi).
- Indarti, I., Kuntari, Y., Widya, S., & Semarang, M. (n.d.). Model Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Pesisir Melalui Re-Engineering Ekonomi Berbasis Koperasi Berkelanjutan.
- Nurahman, A. (2021). Menghadirkan Pemerintah Dalam Realitas Virtual.
- Rahmat Abdul. (2014). Pengantar Pendidikan (Teori, Konsep, dan Aplikasi).
- Rahmat Abdul, Husain Rusmin, Luawo Yones Eni, Ishak Dewi, & Ibura Irvan R. (2020). Belajar Dari Alam Biluhu.
- Rahmawati Aminah Dewi. (2022). Perubahan Sosial Kajian Tentang Paradigma Teori, Kekuatan-Kekuatan Perubahan Dan Proses Perubahan Sosial Dalam Masyarakat.
- Rosmawatitiro, AB Subhan, Lamusu Falimu, Abdullah Sukmawati, Ekasari Retno, Harahap Viana Safrida, Tendy, Puspa Yuyun Yunita, Nusmawantoro Patriandi, Wismurti Saktisyahputra, Nugraha Ega, Salijah Erni, & Kede Adrian. (2023). Komunikasi Pembangunan (Rayhaniah Sri Ayu, Ed.).
- Satria Arif. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir.
- Wahab, A., Kosilah, Sanwil, T., Rusnawati, Handayani, G., Hawa, S., Saodah, Samsiah, N., Hadi, F. R., & Syarifuddin. (2021). Teori dan Aplikasi Ilmu Pendidikan (N. Saputra, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Yahya Mohammad. (2020). Ilmu Pendidikan.
- Zid Muhammad, Sartika Dewi, & Tarmiji Alkhudri Ahmad. (n.d.). SosiologiPesisir Catatan kecil dari pedesaan banten.
- Prihandana R., Hendroko R. & Nuramin M. (2006). *Menghasilkan Biodiesel Murah Mengatasi Polusi dan Kelangkaan BBM*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka.

### Dari skripsi/tesis/desertasi/ Jurnal

- Abdiansyah Muhammad. (2018). Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mempromosikan Budaya Kain Tenun Songket Di Desa Padang Genting Kabupaten Batubara.
- Akmalia, H. A., Indraswati, D., & Polonia, B. S. E. (2021). Pendampingan Pembelajaran Daerah Terpencil di SD Negeri 1 Tumbang Kuling Kotawaringin Timur Kalimantan



- Tengah. Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, 5(2), 243–252.  
<https://doi.org/10.29407/ja.v5i2.15267>
- Era Hia Era. (2019). *The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency Era Era Hia THE Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency. The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency Era Era Hia The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency*, Xi.
- Farida, N., & Andalas, E. F. (2019). Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Dengan Perkotaan Dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramodya Ananta Toer. *Kembara Journal of Scientific Language Literature and Teaching*, 5(1), 74.  
<https://doi.org/10.22219/kembara.v5i1.7447>
- Febriwita Yosi. (2020). Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue. *Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Di Kabupaten Simeulue* .
- Gandasari, D., Muslimah, T., Pramono, F., Nilamsari, N., Iskandar, A. M., Wiyanti, E. K., Aminah, R. S., Nahuway, L., & Sudarmanto, E. (2022). *Pengantar Komunikasi Antarmanusi*. Yayasan Kita Menulis.
- Hayati Isra. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)*.
- Mansyur Khumairah. (2019). *Budaya Pendidikan Anak Pesisir di Wilayah Kepulauan Spermonde (Vol. 1, Issue 2)*. Mei-Agustus.
- Mariana. (2022). *Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi pada Kota Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)*.
- Nur, A. (n.d.). *Paradigma Masyarakat dan Keredupan Masa Depan Pendidikan di Desa*.
- Nur Fauziah. (2018). *Analisis Ketimpangan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Renstra\_2021-2026\_Disdik. (N.D.).
- Sugiyono, Prof. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Cv.
- Sumantri, M. (2019). *Respon Masyarakat Pesisir Terhadap Pendidikan Di Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat Skripsi*.
- Tarigan F Wahyu, Kerebungu Ferdinand, & Sidik Sangputri. (2022). Kesenjangan Sosial pada Pendidikan Anak di Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara. *Indonesian Journal of Social and Education*, 2(2797–9490), 43–51.  
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/ijse/index>
- Tommy, M., Putera, F., & Rhussary, M. L. (2018). *Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3t (Terdepan, Terpencil Dan Tertinggal) Di Kabupaten Mahakam Hulu*.



- Wardani, S. A. (2018a). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Banyumas. Universitas Jendral Soedirman.
- Wardani, S. A. (2018b). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Banyumas. Universitas Jendral Soedirman.
- Wayan I Cong Sajuna. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia, 4(2527–5445).